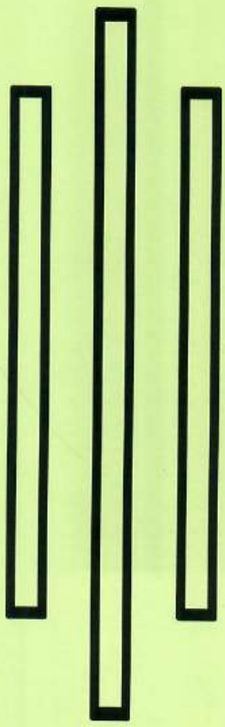
RENCANA KERJA
DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

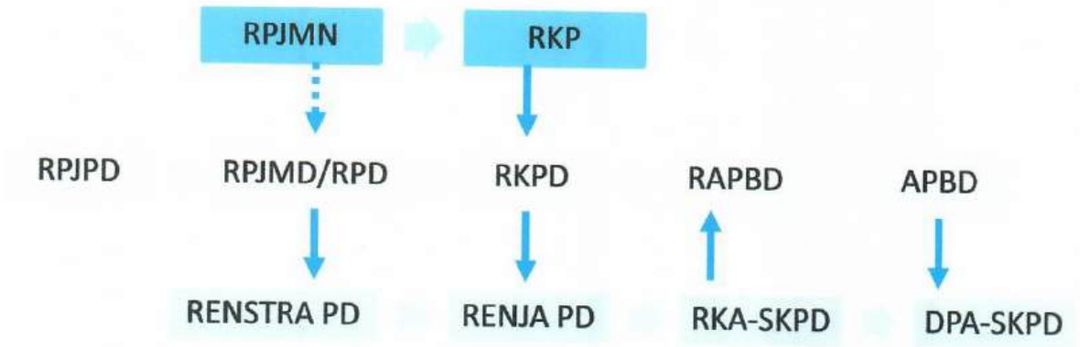
Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubanan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD), serta Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.
Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Keterangan:
⋯→ diperhatikan
→ dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;
34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026
35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
36. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor XX Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran atau pagu indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah:

a. Merumuskan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.
b. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, pagu indikatif, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan tahun 2024;
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024; dan
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2022, serta pencapaian RPJPD Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja s/d Tahun 2022

(Target Berdasarkan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023)

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2022)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2022)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja									
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**80 %**		85%	80%	90%	90%	90%	90%
2	**07**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun**		**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	4 Jenis	7 laporan	7 laporan	100%	7 jenis	0	0%
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkatdaerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 laporan	-	1 laporan	0	0%	0	0	0%
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun**		**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang	12 bulan	18 orang	13 orang	72%	13 orang	13 orang	13 orang
2	07	01	2.02	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi	20 laporan	2 Semester	20 laporan	20 laporan	100%	12 bulan	6 bulan	50%

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2022)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2022)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
						Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
2	**07**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun**		**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**
2	07	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	18 paket	-	0	12 paket	120%	-	-	-
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Bagian Umum yang Dilaksanakan**		**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	10 Jenis / 12 Bulan	1 paket	0	**0%**	0	0	0%
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	12 Bulan	1 paket	1 paket	100%	12 bulan	6 bulan	50%
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	15 Jenis / 12 Bulan	1 paket	1 paket	100%	12 bulan	6 bulan	50%
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	12 Bulan	1 dokumen	1 dokumen	100%	12 bulan	6 bulan	50%
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	12 Bulan	1 laporan	1 laporan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	12 Bulan	1 laporan	1 laporan	100%	12 bulan	6 bulan	50%

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2022)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2022)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
2	07	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	12 Bulan	1 dokumen	1 dokumen	100%	0	0	0%
2	**07**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah SKPD yang diadakan**		0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2	07	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	0	0	0%	0	0	0%
2	07	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	0	0	0%	0	0	0%
2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	150 unit	-	0	0	0%	0	0	0%
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 unit	-	0	0	0%	0	0	0%
2	07	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 unit	-	0	0	0%	0	0	0%
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**		**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 dokumen	165 Surat	1 dokumen	1 dokumen	100%	100 materai	250 materai	25%
2	07	01	2.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	12 Bulan	1 laporan	1 laporan	100%	12 bulan	6 bulan	50%

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2022)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2022)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 Bulan	12 laporan	12 laporan	100%	12 bulan	6 bulan	50%
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah SKPD yang terawat dipelihara.**		**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**	**95%**
2	07	01	2.09	01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 orang / 12 bulan	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	50%
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	6 Orang / 12 Bulan	10 unit	10 unit	100%	10 unit	10 unit	50%
2	07	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit	-	2 unit	2 unit	100%	0	0	0%
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	8 Jenis/12 Bulan	5 unit	5 unit	100%	5 unit	5 unit	50%
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	2 Orang / 12 Bulan	5 unit	5 unit	100%	0	0	0%
2	07	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	12 bulan	5 unit	5 unit	100%	5 unit	5 unit	50%
2	**07**				**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**									
2	**07**	**02**			**Program Perencanaan Tenaga Kerja**	**Prosentase akurasi, proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja**	**60%**	0%	-	-	-	-	0%	0%
2	**07**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Rencana Kerja (RTK)**	**Persentase perusahaan yang menyusun RTK**	**4%**	0%	-	-	-	-	0%	0%
2	**07**	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (RTK) yang disusun	1 dokumen	-	-	-	-	-	0	0%

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2022)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2022)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
2	**07**	**03**			**Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Prosentase penerapan program pelatihan berbasis kompetensi dengan kualifikasi klaster**	**100%**							
2	07	03	2.01		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Persentase peserta pelatihan yang telah mandiri secara ekonomi**	60%	59,13%	65%	65,55%	100,85%	65%	70%	100%
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	180 orang	295 orang	778 orang	778 orang	100%	40 peserta	40 peserta	100%
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kesepakatan atau koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas intruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktifitas	40 Lembaga	-	-	-	-	-	0	0%
2	07	03	2.02		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Persentase LPK swasta yang dibina**	80%	-	-	-	-	-	-	-
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	30 Lembaga	20 orang	-	-	-	-	-	-
2	07	03	2.04		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Persentase perusahaan kecil yang mendapatkan konsultansi peningkatan produktivitas**	5%	-	-	-	-	-	-	-
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada perusahaan kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultansi peningkatan produktivitas	10 perusahaan	-	-	-	-	-	-	-
2	07	03	2.03		**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	**Persentase LPK yang memiliki perizinan**	100%	-	-	-	-	-	-	-
2	07	03	2.03	01	Penyediaan Sumberdaya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara terintegrasi	Jumlah sumberdaya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintergrasi	3 perizinan	-	-	-	-	-	-	-

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2022)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2022)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
2	**07**	**03**	**2.05**		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja tingkat daerah**	**1%**	-	-	-	-	-	-	-
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	25 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2	**07**	**04**	**2.05**		**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja**	**72%**	-	71%	66,79%	94,07%	71%	85%	100%
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan**	**85%**	-	84%	82,24%	97,90%	84%	80 orang	100%
2	07	04	2.01	01	Penyediaan sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah sdm pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatiahan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	1500 orang	-	80 orang	80 orang	100%	80 orang	80 orang	100%
2	07	04	2.01	02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layan AKAD dan AKL	400 orang	-	-	-	-	-	0	0%
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi pencari kerja	Jumlah pencari kerja yang mendaptkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	150 Orang	-	-	-	-	-	-	-
					Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	20 orang	-	-	-	-	-	-	-
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	500 orang	-	-	-	-	-	-	-
2	**07**	**04**	**2.02**		**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase LPTKS yang memiliki perizinan**	**5%**	-	-	-	-	-	-	-
2	07	04	2.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah perizinan LPTKS yang terintergrasi	15 Lembaga	-	-	-	-	-	-	-
2	07	04	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan	15 Lembaga	-	-	-	-	-	-	-

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2022)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2022)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
						Pengendaliansesuai dengan aturan yang berlaku								
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persentase penempatan tenaga kerja melalui sistem informasi pasar kerja (IPK) online**	**70%**	-	-	-	-	-	-	-
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online	5 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencaridan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui jumlah sistem online (karir hub)	1.000 orang	-	-	-	-	-	-	-
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendaatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	1.250 orang	-	2000 orang	0	0%	0	0	0%
2	**07**	**04**	**2.04**		**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penemp atan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase PMI (pra dan purna penempatan) yang terfasilitasi**	**70%**	-	-	-	-	-	-	-
2	07	04	2.04	01	PeningkatanPerlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI /PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	50 Orang	-	-	-	-	-	-	-
					Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani	20 orang	-	-	-	-	-	-	-
2	07	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI purnayang diberdayakan	40 orang	-	-	-	-	-	-	-
2	07	05			**Program Hubungan Industrial**	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan**	**80%**	50%	90%	60%	66,67%	90%	90%	100%
2	07	05	2.01		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan**	**Persentase perusshaan yang telah mempunyai PP/PKB**	**15%**							

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2022)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2022)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
					Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota									
					Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan HI dan terdaftar di WLKP online	35 perusahaan	-	-	-	-	-	-	-
					Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan	Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja bersama	35 perusahaan	-	-	-	-	-	-	-
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjaserta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan (Pendataan sarana HI)	30 laporan	30 perusahaan					0	0%
2	07	05	2.01			Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan (Pembinaan Kepesertaan BPJS)	1 laporan	1 laporan					0	0%
2	07	05	2.02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase Angka Sengketa per Tahun	4%	1,18%	1,50%	2,78%	185,33%	1,50%	1%	100%
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	50 perkara	70 perusahaan					0	0%

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2022)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2022)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
						Jumlah perselisihan yang dicegah (Pemantauan UMK)	80 perkara						0	0%
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, MogokKerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara perselisihan yang terselesaikan (Penyelesaian Perselisihan HI)	20 perkara						0	0%
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan RekapitulasiK eanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/SerikatBuruhserta non afiliasi	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi (Pembinaan Hi dan Norma Kerja)	40 asosiasi dan SP	35 Orang	40 perusahaan	0	0%	40 perusahaan	40 perusahaan (SP = 16x2 orang + 8 perusahaan)	100%
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	30 lembaga	1 usulan						0%
						Jumlah LKS Tripartit yang dibina (Pemberdayaan LKS Tripartit)	30 lembaga		1 lembaga	1 lembaga	100%	0	0	0%
						Jumlah LKS Tripartit yang dibina (Penetapan UMK)	50 lembaga	-	-	-	-	-	-	-
						Jumlah LKS Tripartit yang dibina (Deteksi Dini Kerawanan HI)	25 lembaga	-	-	-	-	-	-	-
2	07	05	2.02	05	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Jumlah program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	80 orang	-	-	-	-	-	-	-
3					**Urusan Pemerintahan Pilihan**		**10 KK**							
3	32				**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**		**10 KK**							
3	32	03			**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan**	30%	0%	70%	20%	28,57%	70%	80%	100%

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2022)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2022)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
3	**32**	**03**	**03**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase calon transmigran yang diberangkatkan**	**30%**	0%	70%	20%	28,57%	70%	80%	100%
3	32	03	03	01	Koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan Transmigrasi yang berasaldari 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	3 laporan	-	-	-	-	-	-	-
3	32	03	03	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasaldari 1 (satu) daerahKabupaten / Kota	Jumlah Transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	10 KK		1 KK	1 KK	100%	7KK	Penjajakan lokasi transmigran ke Sultra	42%
3	32	03	03	05	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Jumlah calon Transmigran yang mendapatkan penyuluhan	50 orang		200 orang	100 orang	50%	0	0	0%
				07	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan diri di satuan pemukiman transmigrasi	4 KK	-	-	-	-	-	-	-
				09	Penjajakan ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang dilaksanakan Penjajakan	4 lokasi	-	-	-	-	-	-	-
				12	Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran	Jumlah Calon Transmigran yang mendapatkan pelatihan	10 KK	-	-	-	-	-	-	-
				18	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan Kabupaten/kota sampai ke lokasi	10 KK	-	-	-	-	-	-	-
				19	Bantuan permodalan (dalam bentuk uang saku)	Jumlah bantuan permodalan yang	10 paket	-	-	-	-	-	-	-

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2022)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2022)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
						diberikan kepada transmigran								
3	32	03	2.01	20	Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi	Jumlah lokasi transmigrasi yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi	3 lokasi	-	-	-	-	-	-	-

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian RPJPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJPD Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	**Capaian Kinerja**	**Predikat**
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**84,31%**	**Tinggi**
Faktor Penyebab	**Implikasi Terhadap Target Renstra PD**	**Kebijakan Yang Diambil**
Pagu gaji induk yang dibayar untuk tenaga ASN Disnakerkop ternyata tidak dipecah melainkan mempunyai anggaran tersendiri. Sehingga untuk anggaran belanja pegawai yang di PAK harus sesuai peta jabatan yang ada. Kemudian sampai pada akhir tahun peta jabatan tidak terisi sehingga	Terdapat resiko kurang tercapainya target kinerja	

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
terjadi silpa anggaran belanja yang cukup besar sehingga anggaran yang mampu terserap adalah sebesar 53,40%		
Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	**84,73%**	**Tinggi**
Faktor Penyebab	**Implikasi Terhadap Target Renstra PD**	**Kebijakan Yang Diambil**
Persentase peserta pelatihan yang telah mampu mandiri secara ekonomi tercapai 65,55% hal ini mampu mencapai dari target yang telah ditetapkan di tahun 2022 sebesar 65%.	Target kinerja sudah tercapai	Memaksimalkan kegiatan pelatihan sesuai anggaran yang ada.
Program Penempatan Tenaga Kerja	**89,66%**	**Tinggi**
Faktor Penyebab	**Implikasi Terhadap Target Renstra PD**	**Kebijakan Yang Diambil**
Adanya pengurangan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan dikarenakan akibat dampak dari terjadinya perang di Eropa, perusahaan yang perdagangannya berkiblat di Eropa mengalami pengurangan order produksi. Sehingga banyak perusahaan di tanah air yang berdampak buruk terhadap omset produksi dan ini mengakibatkan banyaknya PHK ataupun pengurangan penempatan tenaga kerja yang telah dilatih oleh Dinas Tenaga Kerja.	Terdapat resiko kurang tercapainya target kinerja	Memaksimalkan kegiatan magang kerja berbasis masyarakat yang ditempatan di perusahaan maupun penyiapan sumber daya pelayanan antar kerja yang dilatih untuk peningkatan kompetensi sesuai anggaran yang ada.
Program Hubungan Industrial	**93,66%**	**Sangat tinggi**
Faktor Penyebab	**Implikasi Terhadap Target Renstra PD**	**Kebijakan Yang Diambil**
Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan diluar pengadilan tercapai 60% dengan penyebab diantaranya : 1. salah satu pihak yang berselisih tidak mencapai kesepakatan sehingga berlanjut ke penyelesaian di Pengadilan Hubungan Industrial; 2. salah satu pihak yang berselisih dari awal mempunyai keinginan kuat untuk	Tidak tercapainya target renstra Perangkat Daerah pada tahun berjalan sehingga berdampak pada upaya yang jauh lebih besar dalam mengejar ketertinggalan target pada tahun yang akan datang	Memaksimalkan fungsi dan peran Mediator Hubungan Industrial dalam menyelesaikan perselisihan

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
menyelesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial		
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	91,98%	Sangat tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
1. Transmigrasi merupakan program nasional dan saling terkait antar Kementerian, Provinsi dan Kabupaten 2. Terdapat 1 KK yang diberangkatkan transmigrasi dari Kabupaten Nganjuk ke daerah lokasi transmigrasi Sulawesi Tenggara.	Tercapainya target kinerja	Melaksanakan penjajakan lokasi transmigran yang akan diberangkatkan ke transmigrasi ke Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Triwulan IV

2.2. **Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk sampai dengan tahun 2024 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi			Catatan Analisis
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Urusan Tenaga Kerja													
1.	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT)	2,30%	2,20%	4,99%	4,80%	4,65%	3,22	4,80	4.98	4,74	-	-	-	Perubahan Renstra tahun 2018-2023
2.	Prosentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,50%	68%	68,50%	Renstra tahun 2024-2026

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No.	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi			Catatan Analisis
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Urusan Tenaga Kerja													
1.	Pencari kerja yang ditempatkan	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	76%	72,12%	81,06%	81,91%	2.600	2.650	2.700	Perubahan Renstra tahun 2018-2023
2.	Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh	9.200	9.500	9.700	9.850	10.000	60%	78,41%	92,93%	81,42%	-	-	-	Perubahan Renstra tahun 2018-2023
3.	Jumlah transmigran yang diberangkatkan	3 KK	5 KK	7 KK	10 KK	12 KK	6KK	0	0	1 KK	1 KK	1 KK	1 KK	Perubahan Renstra tahun 2018-2023
4	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang selesai dengan perjanjian bersama	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	5	Renstra tahun 2024-2026

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan bidang yang kompleks karena berkaitan langsung dengan tenaga kerja dan transmigrasi yang notabenenya adalah manusia mandiri yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai individu dan makhluk sosial. Ketidak seimbangan lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah pencari kerja akan menimbulkan permasalahan lain yang sifatnya dapat meluas dan keluar dari kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk. Oleh karena itu, koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain perlu mendapatkan perhatian.

Secara umum Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan fungsi pelaksanaan tugas teknis operasional dan penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi ketatalaksanaan yang baik dan profesional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam satu rantai kerja kedinasan guna memberikan pelayanan di bidang ketenagakerjaan di daerah. Indikator umum untuk keberhasilan pelaksanaan fungsi ini adanya tingkat kepuasan pada dasarnya sehingga jumlah lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran. Persentase TPT pada tahun 2022 ini diperoleh dari perbandingan jumlah penduduk yang mengangur sebanyak 26.852 orang terhadap jumlah angkatan kerja sejumlah 566.095 orang. Data tersebut menunjukkan presentase kinerja 4,74% dengan capaian kinerja sebesar 101,19%. Hal ini disimpulkan bahwa persentase kinerja menunjukkan angka 4,74% dengan target pada rencana aksi tahun 2022 yang telah ditentukan sebesar 4,80% maka dikatakan indikator kinerja dengan persentase tingkat pengangguran terbuka mencapai target.

Dalam hal ini indikator tersebut mengalami penurunan persentase tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,24% dari tahun lalu yang mencapai 4,98%. Indikator tersebut dikatakan mencapai target dan dipengaruhi oleh adanya jumlah penduduk yang menganggur telah mengikuti pelatihan ataupun magang kerja di sejumlah perusahaan di Kabupaten Nganjuk sebesar 858 orang yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk.

Capaian indikator persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada triwulan II 2023 tidak ada dikarenakan sumber data ada pada BPS yang diterbitkan setahun sekali di bulan Agustus atau pada triwulan III. Namun, apabila dilihat dari jumlah penduduk yang menganggur pada tahun 2022 yang dikeluarkan oleh BPS sebesar 26.852 terdapat 2.296 penduduk sudah ditempatkan kerja maupun mandiri yang terdiri dari 218 orang peserta

pelatihan yang telah mandiri, 1.756 pencari kerja yang sudah ditempatkan, 322 pencari kerja yang tidak terdaftar.

Persentase TPT Triwulan II padatahun 2023 ini dapat diperoleh dari perbandingan jumlah penduduk yang mengangur sebanyak 24.556 orang terhadap jumlah angkatan kerja sejumlah 566.095 orang. Data tersebut menunjukkan presentase kinerja 4,00% dengan capaian kinerja sebesar 84,21%. Hal ini disimpulkan bahwa persentase kinerja menunjukkan angka 4,00% dengan target pada rencana aksi tahun 2023 triwulan II yang telah ditentukan sebesar 4,75% maka dikatakan indikator kinerja dengan persentase tingkat pengangguran terbuka telah mencapai target. Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 9,2 % pengangguran telah berkurang.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tenaga kerja, maka keluaran (*output*) kegiatan yang dihasilkan adalah pelayanan di sektor ketenagakerjaan meliputi penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Agar pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sektor ketenagakerjaan, menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek-aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan maupun perumusan isu-isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun kegagalan yang bisa mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Permasalahan yang kerap dihadapi pada Dinas Tenaga Kerja adalah :

1. Masih cukup besarnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2. Rendahnya produktifitas tenaga kerja
3. Tidak semua pencari kerja dan perusahaan melaporkan penempatan tenaga kerjanya ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk, sehingga akan mempengaruhi data tenaga kerja yang ditempatkan karena pada kenyataannya jika ada lowongan pekerjaan di perusahaan agak sulit untuk mencari tenaga kerja khususnya laki-laki
4. Terbatasnya kuota penempatan transmigran tidak sebanding dengan animo masyarakat yang ingin mengikuti program transmigrasi.

5. Masih adanya sengketa antara pengusaha dan pekerja

Merujuk pada identifikasi permasalahan di sektor tenaga kerja serta dengan memperhatikan isu-isu penting lainnya, maka beberapa hal yang harus dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk, yakni sebagai berikut:

a. Peningkatan jumlah penyerapan angkatan kerja

b. Peningkatan hubungan industrial yang harmonis

2.4. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2022 dilaksanakan secara elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, sehingga pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 89.80% dengan mutu pelayanan A (Sangat Baik), juga menggunakan indikator penilaian kepuasan masyarakat yang mendasarkan 9 unsur yang diwajibkan dalam peraturan tersebut yang meliputi:

1. Persyaratan yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. Prosedur yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruhproses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/tarif yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara. Segala jenis pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk tidak dipungut biaya atau GRATIS.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku pelaksana yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Sarana yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Untuk semua jenis penerima layanan setiap tahun di Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2

Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target
1.	Persyaratan	100%
2.	Prosedur	100%
3.	Waktu Pelayanan	100%
4.	Biaya/Tarif	100%
5.	Produk Spesifikasi Jenis	100%
6.	Layanan	100%
7.	Kompetensi Pelaksana	100%
8.	Sarana Prasarana	100%
9.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	100%

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017

2.5. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk, terdapat beberapa faktor pendorong maupun faktor penghambat dalam hal peningkatan pelayanan baik dari kondisi internal dan eksternal, antara lain:

Kondisi Internal

a. Faktor Pendorong

1) Kabupaten Nganjuk memiliki potensi sebagai daerah kawasan industri alternatif di Jawa Timur, karena masih banyak lahan yang bisa dimanfaatkan serta angkatan kerja yang cukup banyak;

2) Kondisi hubungan industrial yang relatif kondusif;

b. Faktor Penghambat

1) Belum diterapkannya penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) dengan tegas dan jelas sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat memotivasi Aparatur Sipil Negara (ASN)

2) Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi

3) Belum optimalnya personil dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya

4) Belum optimalnya penggunaan serta pemanfaatan teknologi informasi

Kondisi Eksternal

a. Faktor Pendorong

1) Jumlah Infrastruktur perhubungan yang memadai khususnya dampak pembangunan jalan tol trans jawa.

2) Investor luar daerah mulai mengalihkan investasinya terutama industri padat karya ke daerah yang relatif kondusif hubungan industrialnya, pun juga Upah Minimum Kabupaten Nganjuk dipandang masih rasional

3) Tingginya minat masyarakat dalam mengikuti fasilitasi maupun pelatihan

4) Teknologi informasi yang semakin maju

b. Faktor Penghambat

1) Masih tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran

2) Persaingan produk sejenis dari luar daerah

3) Kurangnya sinergisitas kebijakan/regulasi dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah

4) Masih rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja

5) Banyak tenaga kerja belum bersertifikasi kompetensi (belum lulus uji kompetensi)

6) Rendahnya motivasi untuk bersaing di pasar kerja lokal, nasional maupun global

7) Masih rendahnya kesejahteraan pekerja

8) Minat masyarakat yang terbatas pada jenis jenis pekerjaan tertentu

2.6 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk serta Program Nasional/Internasional Yang Mencakup Standar Pelayanan Minimal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode 2018 – 2023 telah menetapkan Visi dan Misi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaiberikut :

VISI : "Terwujudnya Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)"

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud maka dijabarkan melalui Misi Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk periode 2018-2023 sebanyak 6 (enam) misi, yaitu :

Misi 1:

Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis dan harmonis, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban

Misi 2:

Meningkatkan kinerja birokrasi yang bersih, profesional dan akuntabel (*accountable*) demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan

Misi 3:

Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas

Misi 4:

Meningkatkan keberpihakan pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi tepat guna

Misi 5:

Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan lokal yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata.

Misi 6:

Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana.

Keterkaitan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk terletak pada Misi 4 dengan **tujuan** Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian dan Potensi Lokal yang mana tujuan tersebut mempunyai **sasaran** Meningkatnya Perluasan Lapangan Pekerjaan bagi Masyarakat. Adapun yang menjadi indikator sasaran tersebut adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Dengan dicanangkannya program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program pencapaian 17 Tujuan TPB dan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Secara keseluruhan 17 Tujuan TPB tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yangberkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia.
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.

6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antaranegara.
11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.
14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya lautsecara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi *(means of implementation)* dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi (Perangkat Daerah) memberikan kontibusi terhadap **Tujuan ke 1 yaitu *Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun*** dengan sasaran mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional dan **Tujuan ke 8 yaitu *Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan***

berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang dengan sasaran menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi. Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya. Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah.

Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk meliputi:

1. Faktor Internal
   a. Peluang
      1) Kabupaten Nganjuk memiliki potensi sebagai daerah kawasan industrial ternatif di Jawa Timur, karena masih banyak lahan yang bias dimanfaatkan serta angkatan kerja yang cukup banyak;
      2) Kondisi hubungan industrial yang relative kondusif; dan

   b. Tantangan
      1) Belum diterapkannya penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) dengan tegas dan jelas schingga tidak dapat digunakan sebagai alat memotivasi Aparatur Sipil Negara (ASN);
      2) Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi;
      3) Belum optimalnya penggunaan serta pemanfaatan teknologi informasi.

2. Faktor Eksternal
   a. Peluang
      1) JumlahInfrastruktur perhubungan yang memadai khususnya dampak pembangunan jalan tol trans jawa;
      2) Investor luar daerah mulai mengalihkan investasinya terutama industry padat karya kedaerah yang relative kondusif hubungan industrialnya, pun juga Upah Minimum Kabupaten Nganjuk dipandang masih rasional;
      3) Tingginya minat masyarakat dalam mengikuti fasilitasi maupun pelatihan;
      4) Teknologi informasi yang semakin maju.

b. Tantangan

1) Masih tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran;
2) Persaingan produk sejenis dari luar daerah;
3) Kurangnya sinergisitas kebijakan/regulasi dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
4) Masih rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja
5) Banyak tenaga kerja belum bersertifikasi kompetensi (belum lulus uji kompetensi);
6) Rendahnya motivasi untuk bersaing di pasar kerjalokal, nasional maupun global;
7) Masih rendahnya kesejahteraan pekerja;
8) Minat masyarakat yang terbatas pada jenis jenis pekerjaan tertentu;

2.6. Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindak lanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tenaga kerja, maka keluaran (*output*) kegiatan yang dihasilkan adalah pelayanan di sektor ketenagakerjaan meliputi penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

Agar pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sektor ketenagakerjaan menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek- aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan maupun perumusan isu- isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun kegagalan yang bisa mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Permasalahan yang kerap dihadapi pada Dinas Tenaga Kerja adalah :

1. Masih cukup besarnya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2. Rendahnya produktifitas tenaga kerja

3. Terbatasnya kuota penempatan transmigran tidak sebanding dengan animo masyarakat yang ingin mengikuti program transmigrasi.
4. Masih adanya sengketa antara pengusaha dan pekerja

Merujuk pada identifikasi permasalahan di sektor tenaga kerja serta dengan memperhatikan isu-isu penting lainnya, maka beberapa hal yang harus dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk, yakni sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah penyerapan angkatan kerja
2. Peningkatan hubungan industrial yang harmonis

2.7. Dampak Pandemi Covid-19

Pembangunan pada tahun 2020 dihadapkan pada tantangan yang berat dengan adanya pandemi COVID-19. Perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan juga mengalami peningkatan. Pemerintah sejak tahun 2020 telah melakukan berbagai upaya pengendalian COVID-19 melalui kebijakan pembatasan sosial, penguatan sistem *testing-tracing-treatment*, dan pemberian stimulus bagi masyarakat terdampak. Dalam mencapai *herd immunity*, pada tahun 2021 telah dimulai pemberian vaksin secara bertahap.

Gambar 3.1
Perkembangan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Nganjuk



Sumber: Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional Tahun 2022

Dampak pandemi COVID-19 masih mungkin berlanjut hingga tahun 2022, karena itu, berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara promotif, preventif, maupun kuratif, termasuk pelaksanaan

vaksinasi untuk mencapai herd immunity perlu dilanjutkan. Pandemi Covid-19 juga perlu dipandang sebagai momentum untuk penguatan sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan. Kondisi pandemi COVID-19 tidak menyurutkan upaya dalam pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

2.8. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah **"Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Penguatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Potensi Unggulan Daerah, Pembangunan Infrastruktur dan Reformasi Birokrasi".**

Proses review rancangan awal RKPD Tahun 2024 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2024 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut:

Tabel 2.6

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan / Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disnaker	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	A	**4.697.796.950**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Disnaker	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	A	**4.697.796.950**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disnaker	**Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun**	**7 dokumen**	**15.680.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Disnaker	**Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun**	**7 dokumen**	**15.680.000**	
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	15.680.000	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	15.680.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disnaker	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**21 laporan**	**3.791.378.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Disnaker	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**21 laporan**	**3.791.378.000**	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disnaker	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang	3.787.233.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disnaker	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang	3.787.233.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	20 Laporan	4.145.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Laporan	4.145.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disnaker	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 dokumen**	**3.330.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Disnaker	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 dokumen**	**3.330.000**	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Disnaker	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	18 paket	3.330.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Disnaker	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	18 paket	3.330.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disnaker	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5 dokumen**	**188.942.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Disnaker	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5 dokumen**	**188.942.000**	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disnaker	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	31.369.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disnaker	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	31.369.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disnaker	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	11.848.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disnaker	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	11.848.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disnaker	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	6.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disnaker	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	6.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disnaker	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	4.725.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disnaker	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	4.725.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	135.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	135.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disnaker	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**14 laporan**	**470.820.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Disnaker	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**14 laporan**	**470.820.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 dokumen	2.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 dokumen	2.500.000	
	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	81.500.000	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	81.500.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	386.820.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	386.820.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disnaker	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**26 unit**	**227.646.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Disnaker	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**26 unit**	**227.646.000**	
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disnaker	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	55.146.000	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disnaker	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	55.146.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disnaker	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disnaker	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disnaker	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	15.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disnaker	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	15.000.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disnaker	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	150.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disnaker	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	150.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Disnaker	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 unit	7.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Disnaker	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5 unit	7.500.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		yang Dipelihara/Direhabilitasi			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		yang Dipelihara/Direhabilitasi			
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Disnaker				**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**	Disnaker				
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Disnaker	**Prosentase akurasi, proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja**	**100%**	**100.000.000**	**Program Perencanaan Tenaga Kerja**	Disnaker	**Prosentase akurasi, proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja**	**100%**	**100.000.000**	
	Penyusunan Rencana Kerja (RTK)	Disnaker	**Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja**	**1 dokumen**	**100.000.000**	**Penyusunan Rencana Kerja (RTK)**	Disnaker	**Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja**	**1 dokumen**	**100.000.000**	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Disnaker	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (RTK) yang disusun	1 dokumen	100.000.000	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Disnaker	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (RTK) yang disusun	1 dokumen	100.000.000	
	Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker	**Prosentase penerapan program pelatihan berbasis kompetensi dengan kualifikasi klaster**	**100%**	**875.000.000**	**Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	Disnaker	**Prosentase penerapan program pelatihan berbasis kompetensi dengan kualifikasi klaster**	**100%**	**875.000.000**	
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Disnaker	**Persentase peserta pelatihan yang telah mandiri secara ekonomi**	**71%**	**815.000.000**	**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	Disnaker	**Persentase peserta pelatihan yang telah mandiri secara ekonomi**	**71%**	**815.000.000**	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi	Disnaker	Jumlah tenaga kerja yang mendapat Pelatihan berbasis	220 orang	665.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Disnaker	Jumlah tenaga kerja yang mendapat Pelatihan	220 orang	665.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi		kompetensi pada tahun n			Berdasarkan Klaster Kompetensi		berbasis kompetensi pada tahun n			
	Pengadaan sarana pelatihan sarana pelatihan kerja Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	30 paket	150.000.000	Pengadaan sarana pelatihan sarana pelatihan kerja Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan kerja	30 paket	150.000.000	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Disnaker	**Persentase LPK swasta yang dibina**	**80%**	**10.000.000**	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Disnaker	**Persentase LPK swasta yang dibina**	**80%**	**10.000.000**	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Disnaker	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	27 lembaga	10.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Disnaker	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	27 lembaga	10.000.000	
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	**Persentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja tingkat daerah**	**1%**	**50.000.000**	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Disnaker	**Persentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja tingkat daerah**	**1%**	**50.000.000**	
	Pengukuran Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja	Disnaker	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	5 dokumen	50.000.000	Pengukuran Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja	Disnaker	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	5 dokumen	50.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Disnaker	**Persentase pencari kerja yang ditempatkan**	**83%**	**1.000.000.000**	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	Disnaker	**Persentase pencari kerja yang ditempatkan**	**83%**	**1.000.000.000**	
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	**Persentase pencari kerja terdaftar yang mendapatkan fasilitasi pelayanan antar kerja**	**86%**	**925.000.000**	**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Disnaker	**Persentase pencari kerja terdaftar yang mendapatkan fasilitasi pelayanan antar kerja**	**86%**	**925.000.000**	
	Pelayanan Antar Kerja	Disnaker	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layan AKAD dan AKL	200 orang	600.000.000	Pelayanan Antar Kerja	Disnaker	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layan AKAD dan AKL	200 orang	600.000.000	
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi pencari kerja	Disnaker	Jumlah pencari kerja yang mendaptkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	50 orang	100.000.000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi pencari kerja	Disnaker	Jumlah pencari kerja yang mendaptkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	50 orang	100.000.000	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Disnaker	Jumlah Pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui jumlah	300 orang	25.000.000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Disnaker	Jumlah Pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar	300 orang	25.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			sistem online (karir hub)					kerja melalui jumlah sistem online (karir hub)			
	Job Fair/Bursa Kerja	Disnaker	Jumlah pencari kerja yang mendaatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	1.500 orang	200.000.000	Job Fair/Bursa Kerja	Disnaker	Jumlah pencari kerja yang mendaatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	1.500 orang	200.000.000	
	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penemp atan) di Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	**Persentase PMI (pra dan purna penempatan) yang terfasilitasi**	**4%**	**75.000.000**	**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penemp atan) di Daerah Kabupaten/Kota**	Disnaker	**Persentase PMI (pra dan purna penempatan) yang terfasilitasi**	**4%**	**75.000.000**	
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Disnaker	Jumlah PMI purna yang diberdayakan	20 orang	75.000.000	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Disnaker	Jumlah PMI purna yang diberdayakan	20 orang	75.000.000	
	Program Hubungan Industrial	Disnaker	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang**	**90%**	**800.000.000**	**Program Hubungan Industrial**	Disnaker	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan**	**90%**	**800.000.000**	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			diselesaikan diluar Pengadilan								
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanajian Kerja Bersama untu yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Disnaker	**Jumlah perusahaan yang telah menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja diatas 50%**	**107 perusahaan**	**50.000.000**	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanajian Kerja Bersama untu yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota**	Disnaker	**Jumlah perusahaan yang telah menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja diatas 50%**	**107 perusahaan**	**50.000.000**	
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial teaga Kerja Pengupahan	Disnaker	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	1 laporan	50.000.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial teaga Kerja Pengupahan	Disnaker	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	1 laporan	50.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	**Presentase Angka Sengketa per Tahun**	**1%**	**750.000.000**	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Disnaker	**Presentase Angka Sengketa per Tahun**	**1%**	**750.000.000**	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah perselisihan yang dicegah	5 perkara	300.000.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah perselisihan yang dicegah	5 perkara	300.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah Perkara perselisihan yang terselesaikan (Penyelesaian Perselisihan HI)	5 perkara	100.000.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah Perkara perselisihan yang terselesaikan (Penyelesaian Perselisihan HI)	5 perkara	100.000.000	
	Penyelenggaraan Verifikasi dan RekapitulasiKeanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serika t Buruh serta non afiliasi	Disnaker	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi (Pembinaan Hi dan Norma Kerja)	16 asosiasi dan SP	50.000.000	Penyelenggaraan Verifikasi dan RekapitulasiKeanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serika t Buruh serta non afiliasi	Disnaker	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi (Pembinaan Hi dan Norma Kerja)	16 asosiasi dan SP	50.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 lembaga	150.000.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 lembaga	150.000.000	
	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Disnaker	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	90 orang	150.000.000	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Disnaker	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	90 orang	150.000.000	
	Urusan Pemerintahan Pilihan	Disnaker				**Urusan Pemerintahan Pilihan**	Disnaker				
	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	Disnaker			**225.000.000**	**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**	Disnaker			**225.000.000**	
	Program Pembangunan	Disnaker	**Persentase tingkat keberhasilan**	**100%**	**225.000.000**	**Program Pembangunan**	Disnaker	**Persentase tingkat keberhasilan**	**100%**	**225.000.000**	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kawasan Transmigrasi		**transmigran yang diberangkatkan**			**Kawasan Transmigrasi**		**transmigran yang diberangkatkan**			
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	**Persentase calon transmigran yang diberangkatkan**	**20%**	**225.000.000**	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Disnaker	**Persentase calon transmigran yang diberangkatkan**	**20%**	**225.000.000**	
	Koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan Transmigrasi yang berasaldari 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota	Disnaker	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1 laporan	50.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan Transmigrasi yang berasaldari 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota	Disnaker	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1 laporan	50.000.000	
	Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran	Disnaker	Jumlah pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang)	1 dokumen	50.000.000	Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran	Disnaker	Jumlah pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang)	1 dokumen	50.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasaldari 1 (satu) daerahKabupaten / Kota	Disnaker	Jumlah Transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	3 KK	75.000.000	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasaldari 1 (satu) daerahKabupaten / Kota	Disnaker	Jumlah Transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	3 KK	75.000.000	
	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Disnaker	Jumlah calon Transmigran yang mendapatkan penyuluhan	50 orang	50.000.000	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Disnaker	Jumlah calon Transmigran yang mendapatkan penyuluhan	50 orang	50.000.000	

Sumber : Hasil Analisis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

2.9. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk. Sesuai dengan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu menggunakan pendekatan atas-bawah (*top-down*) yaitu perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah (*top-down*) diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Namun demikian sesuai tugasnya untuk menyelenggarakan urusan penunjang pemerintah daerah di bidang tenaga kerja mempunyai kewajiban mendukung kebijakan Kepala Daerah sesuai dengan Tri Cita Bhakti Bupati Nganjuk Tahun 2018 – 2023 yaitu :

1. Pembangunan infrastruktur publik yang berkualitas
2. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang unggul
3. Kemandirian ekonomi daerah

Disinilah semua data dari para pemangku kepentingan berawal dan berakhir. Usulan dari semua pemangku kepentingan disusun sebagai bahan untuk didiskusikan, ditelaah secara kritis oleh semua pemangku kepentingan pengusul, dan konfirmasi kembali sebelum diproses menjadi Rencana Kerja (RENJA). Telaahan usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan selajutnya disajikan dalam tabel di bawah ini

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disnaker	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disnaker	**Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun**		
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disnaker	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disnaker	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disnaker	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**		

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disnaker	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disnaker	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disnaker	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disnaker	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disnaker	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 dokumen	
	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Disnaker	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**		
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disnaker	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disnaker	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disnaker	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disnaker	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Disnaker			
	Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker	**Prosentase penerapan program pelatihan berbasis kompetensi dengan kualifikasi klaster**		
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Disnaker	**Persentase peserta pelatihan yang telah mandiri secara ekonomi**		
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Disnaker	Jumlah tenaga kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	180 orang	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Disnaker	**Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja**		
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	**Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan**		

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyediaan sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Disnaker	Jumlah sdm pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatiahan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	1500 orang	
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Disnaker	**Persentase penempatan tenaga kerja melalui sistem informasi pasar kerja (IPK) online**		
	Job Fair/Bursa Kerja	Disnaker	Jumlah pencari kerja yang mendaatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	1.250 orang	
	Program Hubungan Industrial	Disnaker	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan**		
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	**Presentase Angka Sengketa per Tahun**		
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah perselisihan yang dicegah (Sosialisasi UMK)	50 perkara	
		Disnaker	Jumlah perselisihan yang dicegah (Pemantauan UMK)	80 perkara	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah LKS Tripartit yang dibina (Peringatan Hari Buruh Internasional/May Day)	30 lembaga	

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Disnaker	Jumlah LKS Tripartit yang dibina (Pemberdayaan LKS Tripartit)	30 lembaga	
		Disnaker	Jumlah LKS Tripartit yang dibina (Penetapan UMK)	50 lembaga	
		Disnaker	Jumlah LKS Tripartit yang dibina (Deteksi Dini Kerawanan HI)	25 lembaga	
	Urusan Pemerintahan Pilihan	Disnaker			
	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	Disnaker			
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Disnaker	**Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan**		
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	**Persentase calon transmigran yang diberangkatkan**		
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasaldari 1 (satu) daerahKabupaten / Kota	Disnaker	Jumlah Transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	10 KK	

Sumber : Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2023

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2024 mengangkat tema **"Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"** dengan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah "*Meningkatnya penyerapan angkatan kerja*", adapun sasaran yang akan dicapai adalah "*Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja*", dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2024**
Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,50%
Sasaran Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2024**
Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	83%
Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan	90%

Sumber : Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2024 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

3.1.1 Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk

Untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2024, yaitu **"Pemulihan Ekonomi Dengan Penguatan Sektor Unggulan Daerah Berbasis Pertanian, Pariwisata, Industri Dan Perdagangan Dengan Didukung Sumber Daya Manusia Dan Infrastruktur Yang Berkualitas"**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesetaraan gender, pengendalian penduduk, dan efektifitas penanggulangan kemiskinan;
2. Meningkatkan investasi serta produktivitas dan daya saing sektor unggulan Kabupaten Nganjuk;
3. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi segenap lapisan masyarakat;
4. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan;
5. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, perhubungan, sumber daya air, lingkungan hidup dan peningkatan sarana prasarana dasar permukiman;
6. Peningkatan ketahanan bencana; dan
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov).

Sebagai operasionalisasi strategi dan arah kebijakan pembangunan dirumuskan program Perangkat Daerah yang didalamnya mencakup program pembangunan daerah sebagai representasi 14 (empat belas) Program Unggulan Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk masa bhakti 2018-2023, yang meliputi:

1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan;
2. Peningkatan profesional dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi;
3. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran;
4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan;

5. Penguatan pendidikan diniyah dan pesantren;
6. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat;
7. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai destinasi wisata;
8. Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional;
9. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan;
10. Menjadikan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender;
11. Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal;
12. Revitalisasi bidang pertanian dan peternakan;
13. Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif; dan
14. Pengembangan jejaring antar daerah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat serta warga Nganjuk di perantauan.

Keterkaitan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk terletak pada Rumusan Program yang ke 3 yaitu **Pengentasan kemiskinan dan pengangguran** dengan sasaran Meningkatnya Perluasan Lapangan Pekerjaan bagi Masyarakat. Adapun yang menjadi indikator sasaran tersebut adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

1.3.2. Pencapaian Target Pelayanan Dasar

Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2022 dilaksanakan secara elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, sehingga pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 89.80% dengan mutu pelayanan A (Sangat Baik), juga menggunakan indikator penilaian kepuasan masyarakat yang mendasarkan 9 unsur yang diwajibkan dalam peraturan tersebut yang meliputi:

1. Persyaratan yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun non teknis.
2. Prosedur yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruhproses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/tarif yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan / atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara. Segala jenis pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Nganjuk tidak dipungut biaya atau GRATIS.

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku pelaksana yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Sarana yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak.
9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Untuk semua jenis penerima layanan setiap tahun di Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2

Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target
1.	Persyaratan	100%
2.	Prosedur	100%
3.	Waktu Pelayanan	100%
4.	Biaya/Tarif	100%
5.	Produk Spesifikasi Jenis	100%
6.	Layanan	100%
7.	Kompetensi Pelaksana	100%
8.	Sarana Prasarana	100%
9.	Penanganan Pengaduan,Saran,dan Masukan	100%

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017

3.3.3. Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Upaya pencapaian target TPB/*SDG's* menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/*SDG's* di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Visi RPJMD Kabupaten Nganjuk 2018-2023 adalah "Terwujudnya Kabupaten Nganjuk Yang Maju Dan Bermartabat (Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho)" yang dijabarkan ke dalam enam misi yang selanjutnya diselaraskan dengan target TPB/*SDG's*.

Tabel 2.6

Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Kabupaten Nganjuk

No.	Tujuan/Target/Indikator	Satuan	Target 2024	Pelaksana
1.	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun (Tujuan 1)			
	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional			
	Menurunnya tingkat kemiskinan	%		Dinas Tenaga Kerja
2	Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang (Tujuan 8)			
	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan			

No.	Tujuan/Target/Indikator	Satuan	Target 2024	Pelaksana
	inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.			
	Persentase tenaga kerja formal	%	51%	Dinas Tenaga Kerja
	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.			
	Terciptanya kesempatan kerja	juta	10	Dinas Tenaga Kerja
	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi pemuda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.			
	Meningkatnya keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja.	%		Dinas Tenaga Kerja
	Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan *kerja yang aman dan terjamin bagi* semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.			
	Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat.	%		Dinas Tenaga Kerja

Sumber: Perpres Nomer 59 Tahun 2017

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS TENAGA KERJA KAB. NGANJUK
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS TENAGA KERJA						**9.704.716.452,00**							**8.767.261.734,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**9.693.366.452,00**							**8.642.261.734,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**9.693.366.452,00**							**8.642.261.734,00**	
1	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja***	-			**80,5 Nilai**	**5.951.204.652,00**						-	**5.308.261.734,00**	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencaan perangkat daerah yang disusun*	-			14 laporan	15.680.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Penganteasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas tenaga kerja	-	15.680.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	15.680.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Penganteasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas tenaga kerja		15.680.000,00	DINAS TENAGA KERJA

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	PE		31/7
2.	Kabid Rendalap		31/7 23
3			
4.			
5.			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*JUmlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah*	-			48 dokumen	3.829.345.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas tenaga kerja	-	3.829.318.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				13 Orang/bulan	3.825.193.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas tenaga kerja		3.825.193.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				4 Laporan	4.152.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas tenaga kerja		4.125.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah*	-			1 dokumen	8.462.250,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas tenaga kerja	-	9.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Pakat Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	8.462.250,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas tenaga kerja		9.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah*	-			7 dokumen	419.362.534,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas tenaga kerja	-	391.769.734,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	7.488.264,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas tenaga kerja		7.488.264,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	82.781.150,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas tenaga kerja		76.225.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	16.632.100,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas tenaga kerja		12.151.450,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Becaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	2.400.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas tenaga kerja		6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	11.250.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas tenaga kerja		20.125.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	284.021.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas tenaga kerja		255.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	14.780.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas tenaga kerja		14.780.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang disediakan*	-			197 unit	235.578.068,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas tenaga kerja	-	176.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				150 Unit	44.850.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas tenaga kerja		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				35 Unit	153.795.500,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas tenaga kerja		96.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				12 Unit	36.932.568,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas tenaga kerja		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	-			14 laporan	469.962.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas tenaga kerja	-	490.570.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.782.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas tenaga kerja		1.750.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	78.000.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas tenaga kerja		78.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	390.180.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas tenaga kerja		410.820.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang terpelihara*	-			28 unit	972.824.800,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas tenaga kerja	-	395.924.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	50.623.700,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas tenaga kerja		55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	157.376.100,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas tenaga kerja		225.924.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				2 Unit	15.500.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas tenaga kerja		25.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				37 Unit	30.000.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas tenaga kerja		30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	712.125.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas tenaga kerja		50.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	7.200.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Dinas tenaga kerja		10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
2.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	***Persentase dokumen yang terselesaikan tepat waktu***	-			**100 persen**	**126.800.000,00**						-	**0,00**	
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	*Prosentasse dokumen yang terselesaikn tepat waktu*	-			1 dokumen	126.800.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kab. Nganjuk	-	0,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro				1 Dokumen	126.800.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kab. Nganjuk		0,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	***Presentase penerapan program pelatihan berbasis kompetensi dengan kualifikasi klaster***	-			**100 %**	**2.531.165.250,00**						-	**1.505.000.000,00**	
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	*Persentase peserta pelatihan yang telah mampu mandiri secara ekonomi* *Prosentase LPK Swasta yang dibina*	-			71 % 81 %	2.447.649.250,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	-	1.400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				790 Orang	2.447.649.250,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk		1.400.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	*Prosentase LPK Swasta yang dibina*	-			81 %	66.720.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	-	75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				45 Lembaga	66.720.000,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk		75.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	*Persentase Perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas*	-			7 %	16.796.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	-	30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil														
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				15 Perusahaan	16.796.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk		30.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
4.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	***Persentase pencari kerja yang ditempatkan***	-			**83 %**	**627.830.500,00**						-	**475.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentasse pencari kerja terdaftar yang mendapatkanfasilitas pelayanan antar kerja*	-			86 %	279.230.500,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	-	275.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja														
			Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi				60 Orang	81.892.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk		275.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														
	.		*Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD*				100 Orang	197.338.500,00	- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk		0,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	*Persentase penempatan tenaga kerja melalui siten informasi pasar kerja (IPK) online*	-			80 %	348.600.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	-	200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				4000 Orang	348.600.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk		200.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
5.	2.07.05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	***Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan***	-			**90% %**	**456.366.050,00**						-	**1.354.000.000,00**	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah perusahaan yang telah menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja diatas 50%*	-			75 perusahaan	9.351.850,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	-	806.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	9.351.850,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk		805.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase angka sengketa pertahun*	-			2 %	447.014.200,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk	-	549.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				5 Perkara	268.369.200,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk		219.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				4 Perkara	66.366.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Penggentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk		100.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	52.219.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Penggentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk		150.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				14500 Orang	60.060.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Penggentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Kab. Nganjuk		80.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**11.350.000,00**							**125.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**11.350.000,00**							**125.000.000,00**	
1.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	***Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan***	-			**40 %**	**11.350.000,00**						-	**125.000.000,00**	
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase calon transmigran yang diberangkatkan*	-			40 %	11.350.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kab. Nganjuk	-	125.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	3.32.03.2.01.0009	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran														
			Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan				4 Lokasi	2.000.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kab. Nganjuk		43.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	3.32.03.2.01.0018	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penempungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi				2 KK	7.850.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kab. Nganjuk		42.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	3.32.03.2.01.0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi														
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi				1 Lokasi	1.500.000,00	- Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP3 - Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Produktivitas dan Daya Saing Ketenagakerjaan serta Pengentasan Kemiskinan Mengentaskan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Masyarakat Kab. Nganjuk		40.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	JUMLAH							**9.704.718.452,00**							**8.767.261.734,00**	

3.3.4. Penanganan Pandemi COVID-19

Krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19 telah berdampak sistemik terhadap pembangunan nasional, terutama pada aspek sosial dan ekonomi. Kontraksi ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020 mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran, melemahnya daya beli masyarakat dan menurunnya produktivitas di sektor-sektor strategis. Kebijakan pemulihan ekonomi nasional masih perlu dilakukan pada tahun 2022.

Pandemi Covid-19 mengubah secara signifikan pola interaksi antarmanusia, sehingga berimplikasi terhadap perubahan pola aktivitas ekonomi, sosial, serta pelayanan publik. Penerapan *social distancing* dan protokol kesehatan menuntut penggunaan teknologi digital secara intensif dalam mendukung aktivitas manusia. Kondisi demikian tetap akan berlangsung dalam kehidupan era *new normal*, meskipun *herd immunity* diharapkan telah tercapai di tahun 2022. Penanganan dampak pandemi COVID-19 di Kabupaten Nganjuk diprioritaskan pada:

1. Penanganan kesehatan;
2. Penanganan dampak ekonom; dan
3. Penyediaan jaring pengaman sosial.

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut :

(

)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2022. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam Bidang Tenaga Kerja.

Tabel 4.1

Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi (2024)
1.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup	Rp. 3.626.711.800,00

Tabel 4.2

Sasaran Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (2023)	Alokasi (2024)
1.	Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	83%	Rp.3.170.345.750,00
2.	Meningkatnya hubungan *industrial* yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan	90%	Rp.465.366.050,00

Tabel 4.3

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
		Uraian (Output)	Target	
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	A	**4.697.796.950**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun**	7 dokumen	**15.680.000**
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	15.680.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**21 laporan**	**3.829.345.000**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	13 orang/bulan	3.825.193.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4.152.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 dokumen**	**8.462.250**
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	15 paket	**8.462.250**

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
		Uraian (Output)	Target	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**7 dokumen**	**419.352.534**
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	7.488.284
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	82.781.150
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	16.632.100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	2.400.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	11.250.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	284.021.000
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penataan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	14.780.000
	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	**Jumlah barang milik daerah yang disediakan**	197 unit	**235.578.068**
	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	150 unit	44.850.000
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	35 unit	153.795.500
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	12 unit	36.932.568

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
		Uraian (Output)	Target	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**14 laporan**	**469.962.000**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	1.782.000
	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	78.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	390.180.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**28 unit**	**972.824.800**
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	50.623.700
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	157.376.100
	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	2 unit	15.500.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 unit	30.000.000

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
		Uraian (Output)	Target	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	712.125.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	7.200.000
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	**Prosentase akurasi, proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja**	**100%**	**126.800.000**
	Penyusunan Rencana Kerja (RTK)	**Jumlah dokumen perencanaan tenaga kerja**	**1 dokumen**	**126.800.000**
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (RTK) yang disusun	1 dokumen	126.800.000
	Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	**Prosentase penerapan program pelatihan berbasis kompetensi dengan kualifikasi klaster**	**100%**	**2.531.165.250**
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	**Persentase peserta pelatihan yang telah mandiri secara ekonomi**	**71%**	**2.531.165.250**

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
		Uraian (Output)	Target	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	790 orang	2.447.649.250
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	**Persentase LPK swasta yang dibina**	**81%**	**66.720.000**
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	45 lembaga	66.720.000
	Konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil	Persentase perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktifitas	7%	**16.796.000**
	Pelaksanaan konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktifitas	15 perusahaan	16.796.000
	Program Penempatan Tenaga Kerja	**Persentase pencari kerja yang ditempatkan**	**83%**	**627.830.500**
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase pencari kerja terdaftar yang mendapatkan fasilitasi pelayanan antar kerja**	**86%**	**279.230.500**
	Penyediaan sumberdaya pelayanan antar kerja	Jumlah SDM pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dll untuk meningkatkan kompetensi	60 orang	81.892.000
	Pelayanan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	100 orang	197.338.500

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
		Uraian (Output)	Target	
	Pengelolaan informasi pasar kerja	**Persentase penempatan tenaga kerja melalui sistem informasi pasar kerja (IPK online)**	**80%**	**348.600.000**
	Jobfair/bursa kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui jobfair/bursa kerja	4.000 orang	348.600.000
	Program Hubungan Industrial	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan**	**90%**	**456.365.050**
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanajian Kerja Bersama untu yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	**Jumlah perusahaan yang telah menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja diatas 50%**	**75 perusahaan**	**9.351.850**
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial teaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	1 laporan	9.351.850
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Presentase Angka Sengketa per Tahun**	**2%**	**447.014.200**
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	5 perkara	268.369.200

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
		Uraian (Output)	Target	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, MogokKerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara perselisihan yang terselesaikan (Penyelesaian Perselisihan HI)	4 perkara	66.386.000
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 lembaga	52.219.000
	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	14.500 orang	60.060.000
	Urusan Pemerintahan Pilihan			
	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi			**11.350.000**
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	**Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan**	**40%**	**11.350.000**
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase calon transmigran yang diberangkatkan**	**40%**	**11.350.000**
	Penjajagan ke calon lokasi penempatan calon transmigran	Jumlah calon lokasi penempatan transmigran yang dilaksanakan penjajagan	4 lokasi	2.000.000
	Pendampingan dari Kabupaten sampai ke lokasi	Jumlah transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan/kota sampai ke lokasi	2 KK	7.850.000

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
		Uraian (Output)	Target	
	Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi	Jumlah lokasi transmigrasi yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi	1 lokasi	1.500.000

Tabel 4.4

Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Khusus

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Sasaran Penerima Manfaat			Sumber Pendanaan
			Nama Objek	Jumlah	Rincian	
		NIHIL				

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Tahun 2024 apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Tenaga Kerja dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Dinas Tenaga Kerja yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya; dan
   b. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024; dan

3. Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina
NIP. 19680501 199202 1 001